

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan daerah dikarenakan oleh adanya tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap *good government governance* (Mardiasmo, 2002). UU No. 32/2004 telah mengatur bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yaitu dengan penyampaian informasi laporan keuangan sebagai bukti adanya akuntabilitas dan transparan akan pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Menurut penelitian Sinarwati (2015), Nilai informasi adalah suatu kemampuan yang terkait dengan Informasi yang disampaikan dalam upaya peningkatan keaktifan dan pengetahuan para pengguna informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Penyajian informasi harus dapat bermanfaat bagi *stakeholder* supaya tujuan adanya penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tercapai.

LKPD memiliki kualifikasi tertentu yang telah disyaratkan agar informasi yang ada menjadi berkualitas. PP No. 71/2010 menyebutkan jika terdapat empat karakteristik kualifikasi LKPD, yaitu: 1) Dapat dipahami, informasi yang ada pada LKPD harus dapat diminati oleh pengguna dengan bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batasan pemahaman para penggunanya; 2) Dapat dibandingkan, informasi yang ada pada LKPD harus Dapat diperbandingkan dengan LKPD periode sebelumnya dan dengan LK pada institusi lain; 3) Handal,

informasi yang ada pada LKPD harus bebas dari kesalahan material dan tidak memberikan pengertian yang menyesatkan sehingga jujur dalam penyajiannya 4) Relevan, informasi yang ada pada LKPD harus mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan.

Menurut Rizal (2015), Sumber daya manusia merupakan Suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan sesuai dengan pengalaman, pelatihan, dan pendidikan yang memadai. Oleh sebab itu, untuk mengelola SDM yang baik diperlukan adanya kontribusi yang optimal sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya SDM yang berkualitas tinggi dapat berpengaruh pada nilai informasi LKPD. Penelitian Rizal (2015) mengemukakan jika nilai informasi LKPD dipengaruhi oleh SDM secara positif.

Menurut Winidyaningrum (2010), Pemerintah perlu melakukan optimalisasi pada pemanfaatan pada teknologi informasi dengan melakukan pembangunan pada jaringan sistem informasi manajemen agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah secara terpadu dan lebih sederhana saat unit-unit kerja mengaksesnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut meliputi eksistensi unit-unit untuk mengolah data, mengolah informasi, mekanisme sistem manajemen, memproses tugas-tugas melalui elektronik, dan memanfaatkan TI untuk menghemat dan mempermudah akses pelayanan publik. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, Sedangkan menurut Lilis

setyowati (2014) bahwa pemanfaatan Teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Arfianti (2011), Sistem Pengendalian Intern adalah mekanisme yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari SDM dan sistem TI yang telah direncanakan agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian intern meliputi adanya arahan, pengawasan, dan pengukuran sumber daya untuk dapat mendeteksi dan mencegah penggelapan (*fraud*). PP No. 60/2008 adalah pedoman dalam pengendalian internal bagi pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan penelitian Arfianti (2011), Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi LKPD.

Menurut Cipta (2014), Pengawasan keuangan daerah adalah Usaha sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penetapan standar kinerja dalam merancang *feedback system* untuk dapat membandingkan kinerja standar dengan kinerja aktual bila terjadi penyimpangan, yang dapat dilanjutkan dengan mengambil benda untuk memperbaiki kinerja tersebut sebagai bentuk jaminan efektivitas dan efisiensi sumber data yang diperoleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Anando (2015), Keandalan adalah Suatu kemampuan yang dimiliki oleh informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk meyakinkan kebenaran atau validitas informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan handal jika informasi tersebut terbebas dari kesalahan material dan terbebas dari pengertian yang menyesatkan serta dapat diandalkan oleh pengguna karena adanya kejujuran dalam penyajiannya.

Menurut Anando (2015), Ketepatanwaktuan adalah pelaporan informasi yang sesuai dengan penetapan standar waktu yang telah ditentukan. Informasi tidak memiliki nilai jika informasi tersebut tidak memiliki ketepatan waktu dalam pelaporan sehingga pengguna terlambat untuk mengetahui informasi tersebut sehingga penggunaan informasi mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa nilai informasi LKPD dipengaruhi oleh keandalan dan ketepatanwaktuan secara positif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal Pramudiarta (2015) adalah Peneliti menambahkan dua variabel yang Mempunyai pengaruh yang positif atas nilai informasi LKPD yaitu Pengawasan Keuangan Daerah, Keandalan dan Ketepatanwaktuan.

Berdasarkan fenomena gap yang ada ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Persepsi pada SKPD di Kabupaten Batang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang telah dijelaskan di atas dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batang?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batang?

3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batang?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batang?
5. Apakah keandalan dan ketepatanwaktuan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batang.
2. Untuk membuktikan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batang.
3. Untuk membuktikan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batang.
4. Untuk membuktikan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batang.
5. Untuk membuktikan keandalan dan ketepatanwaktuan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Batang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Aspek teoritis

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk menganalisis nilai informasi LKPD Dan dapat juga digunakan sebagai referensi pada penelitian berikutnya

2. Aspek praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi saran khususnya bagi pemerintah daerah kabupaten Batang untuk upaya peningkatan kualitas LKPD.